



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

- Tahun Sidang : 2022 – 2023
- Masa Persidangan : IV
- Rapat : Ke – 4 (Empat)
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Dengan : Menteri ESDM RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Senin, 20 Maret 2023
- Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d 17.40 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I,
secara tatap muka
- Acara : 1. Langkah-langkah persiapan terkait rencana pelarangan ekspor mineral
2. Progress pembentukan Satgas *Illegal Mining*
3. Progress pembentukan entitas khusus batubara
4. Penjelasan dualisme tugas Dirjen Minerba
5. Penjelasan subsidi kendaraan listrik
6. Lain-lain
- Ketua Rapat : H. Eddy Soeparno, SH., MH
(Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.PAN)
- Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti
- Hadir : A. Pemerintah
- Menteri ESDM RI
 - Sekjen
 - Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI
 - Dirjen Migas Kementerian ESDM RI
 - Plh. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI
- B. 23 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR RI terdiri dari:
- 23 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik
 - 28 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, 20 Maret 2023 dibuka pukul 13.50 WIB, dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, SH., MH, selaku Ketua Rapat Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Langkah-langkah persiapan terkait rencana pelarangan ekspor mineral
 - b. Progress pembentukan Satgas *Illegal Mining*
 - c. Progress pembentukan entitas khusus batubara
 - d. Penjelasan dualisme tugas Dirjen Minerba
 - e. Penjelasan subsidi kendaraan listrik
 - f. Lain-lain
3. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dilanjutkan oleh Bambang Haryadi, SE dari selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk melakukan monitoring secara ketat atas progress pembangunan *smelter*, khususnya untuk bauksit dan tembaga.
2. Komisi VII DPR RI mendukung Menteri ESDM RI untuk melakukan kajian dan evaluasi atas dampak larangan ekspor mineral dengan mempertimbangkan: progres pembangunan *smelter* di lapangan, dampak terhadap pendapatan negara, dan keberlangsungan lapangan kerja di sektor mineral.
3. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk secara tegas menindak kegiatan *illegal mining* yang dilakukan secara sistematis di seluruh wilayah Indonesia melalui percepatan pembentukan Satgas *Illegal Mining*.
4. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk mempercepat implementasi skema tata kelola dana kompensasi batubara (DKB) melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

5. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI dalam pembekuan MODI untuk tetap secara konsisten mengikuti Kepmen ESDM RI No. 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.
6. Komisi VII DPR RI akan mendalami terkait program konversi kendaraan listrik guna efektifitas perencanaan dan pelaksanaan program tersebut dengan Menteri ESDM RI dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.
7. Komisi VII DPR RI akan mendalami terkait percepatan program transisi energi melalui skema pendanaan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dengan Menteri ESDM RI dan jajaran terkait lainnya.
8. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 27 Maret 2023.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.40 WIB

Jakarta, 20 Maret 2023

MENTERI ESDM RI



ARIFIN TASRIF

KETUA RAPAT,



BAMBANG HARYADI, SE

A-109